



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PETERNAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2025-2029 yang merupakan periode yang cukup strategis dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan selalu berupaya mengembangkan kebijakan dan pemanfaatan inovasi teknologi dalam pembangunan hilirisasi hasil peternakan. Kebijakan dan inovasi teknologi merupakan dua pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk peternakan di pasar nasional maupun internasional. Keduanya sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak melalui peningkatan margin keuntungan dari produk olahan dan daya saing pasar. Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai payung hukum dan penggerak ekosistem industri peternakan, melalui kepastian hukum dan standardisasi, insentif investasi, dan perlindungan peternak rakyat. Inovasi dan teknologi pengolahan mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi, dan memaksimalkan pemanfaatan hasil samping dan limbah peternakan. Inovasi dan teknologi dalam pemasaran memastikan logistik dan proses pemasaran yang aman dan mempertahankan mutu produk, *traceability*, dan membantu produsen memetakan daya saing dari tren konsumsi, sehingga produksi hilir sesuai permintaan pasar secara presisi.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Renstra Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 disusun menyelaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur Hilirisasi

Hasil Peternakan,



Makmun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1.PDB Subsektor Peternakan	2
1.1.2.Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan	2
1.1.3.Penjaminan Mutu Hasil Peternakan	5
1.1.4.Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	7
1.1.5.Pemasaran Hasil Peternakan.....	8
1.2. Capaian Renstra 2020-2024	10
1.3. Potensi dan Permasalahan	14
1.3.1.Potensi	14
1.3.2.Permasalahan	18
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PETERNAKAN.....	22
2.1. Visi	22
2.2. Misi.....	24
2.3. Tujuan	25
2.4. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	26
2.4.1. Sasaran Program.....	27
2.4.2. Sasaran Kegiatan.....	29
2.4.3. Manajemen Risiko.....	32
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.....	34
3.3. Kontribusi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terhadap Program Ditjen PKH, Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) Terhadap RPJMN	35
3.4. Kerangka Regulasi.....	37
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1. Target Kinerja.....	42
4.2. Kerangka Pendanaan	43
BAB V. PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Neraca Komoditas Peternakan Tahun 2024	3
Gambar 2. Grafik Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025.....	9
Gambar 3. Grafik Realisasi Ekspor Peternakan Tahun 2020-2024	10
Gambar 4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan...	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pangsa komoditas terhadap PDB Subsektor Peternakan.....	2
Tabel 2.	Pembinaan dan Pendampingan Penjaminan Mutu Hasil Peternakan Tahun 2016-2025.....	6
Tabel 3.	Investasi Subsektor Peternakan, 2020-2024.....	8
Tabel 4.	Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024	11
Tabel 5.	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 6.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan kegiatan Tahun..... 2025-2026	26
Tabel 7.	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029	36
Tabel 8.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi.....	38
Tabel 9.	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKH Tahun 2025-2029	42
Tabel 10.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029	43
Tabel 11.	Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025- 2029.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya berpedoman pada hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029, dan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyelaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 dengan menyusun Renstra Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 untuk memastikan pembangunan hilirisasi hasil peternakan selaras dengan pembangunan pertanian.

Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. PDB Subsektor Peternakan

Presiden Republik Indonesia memiliki cita-cita untuk mengangkat perekonomian Indonesia dari kategori negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perekonomian nasional ditargetkan tumbuh rata-rata minimal 6% per tahun selama periode 2025–2029. Dalam konteks tersebut, subsektor peternakan diharapkan berkontribusi secara optimal dengan pertumbuhan tahunan minimal sebesar 5,68%. Target pertumbuhan ini menjadi suatu keniscayaan, mengingat PDB subsektor peternakan tumbuh sebesar 7,78% pada 2020 dan 6,24% pada 2022.

Berdasarkan *Blue Print* Kementerian Pertanian 2024, komoditas seperti daging susu, daging sapi, daging unggas, dan telur diidentifikasi sebagai prioritas, dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,50%, 15,82%, 24,80%, dan 24,14% terhadap PDB subsektor peternakan.

Tabel 1. Pangsa komoditas terhadap PDB subsektor peternakan

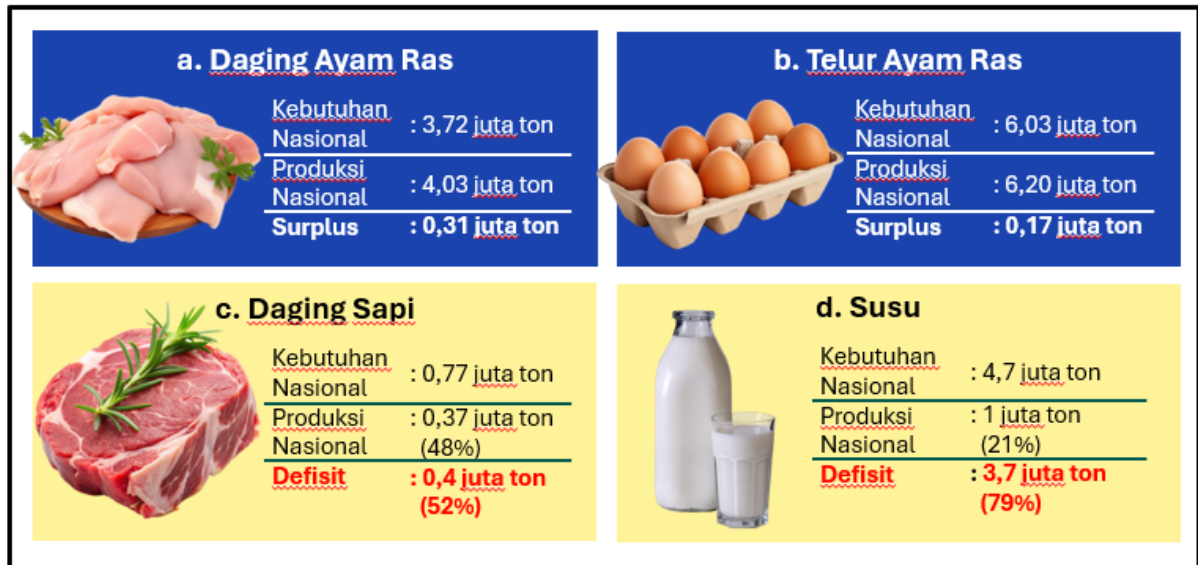
Komoditas	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-rata
Susu Sapi Perah	10,45	14,09	20,55	21,18	21,22	17,50
Daging Sapi Kerbau	15,10	16,67	15,55	15,64	16,15	15,82
Daging Kambing Domba	4,79	5,21	4,96	4,93	5,16	5,01
Daging Unggas (Ayam Ras, Buras, Itik-entog)	26,85	25,43	23,57	24,09	24,04	24,80
Telur Unggas (Ayam Ras, Buras, Itik-Entog)	23,86	24,99	23,80	24,10	23,96	24,14
Lainnya	18,95	13,61	11,57	10,06	9,46	12,73

Sumber: *Blueprint Kementerian Pertanian, 2024*

1.1.2. Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan

Hilirisasi di sektor pertanian termasuk subsektor peternakan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Pascapanen dan kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar hulu hilir, serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Untuk itu, pascapanen, pengolahan dan distribusi produk peternakan menjadi subsistem bisnis peternakan yang sangat penting. Pengolahan dan distribusi produk peternakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh

meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pangan hewani seperti daging, susu, telur, serta berbagai produk olahannya.



Sumber : Ditjen PKH, 2025

Gambar 1. Neraca Komoditas Peternakan Tahun, 2024

Neraca komoditas peternakan untuk daging dan telur ayam ras mengalami surplus pada tahun 2024. Sedangkan untuk daging sapi dan susu masih mengalami defisit. Daging sapi defisit 0,4 juta ton atau 52% dari kebutuhan nasional, dan susu defisit 3,7 juta ton atau 79% dari kebutuhan nasional. Defisit ini dipenuhi utamanya dari impor bakalan, daging, susu bubuk dan krim susu.

Berdasarkan data BPS, pengeluaran riil perkapita/bulan untuk daging mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8%/tahun selama periode 2020-2024, begitu juga untuk telur dan susu meningkat rata-rata sebesar 1,6%/tahun selama periode yang sama. Begitu juga untuk produk olahan peternakan mengalami peningkatan, hal ini diindikasikan dengan peningkatan pengeluaran riil untuk makanan dan minuman jadi termasuk produk olahan peternakan rata-rata sebesar 1,6%/tahun. Pengeluaran riil merupakan pengeluaran yang telah disesuaikan dengan tingkat harga (inflasi), sehingga peningkatan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang sebenarnya, dan merujuk pada biaya yang dikeluarkan.

Peningkatan konsumsi produk peternakan tersebut menuntut penanganan pasca panen, pengolahan dan sistem distribusi produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing. Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan memegang peranan penting dalam menjaga mutu, keamanan pangan, daya simpan dan keberterimaan produk peternakan di pasar.

Sistem distribusi dikembangkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan (harga dan daya beli) pada wilayah non sentra produksi dan wilayah yang membutuhkan, serta menjamin mutu dan keamanan pangan dari produsen hingga ke konsumen.

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan pasca panen, pengolahan dan distribusi adalah modernisasi rantai pasok. Banyak perusahaan peternakan besar dan menengah telah mengadopsi teknologi cold chain (rantai dingin) untuk menjaga kualitas produk, terutama daging dan susu, selama proses distribusi. Sistem logistik berbasis digital juga semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan ketertelusuran (*traceability*). Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendistribusikan produk ke daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah dan swasta berupaya mengatasi hal ini melalui program pembangunan gudang berpendingin dan fasilitasi transportasi berpendingin, dan kerja sama dengan UMKM lokal.

Di bidang persusuan, meskipun produksi susu segar dalam negeri belum mencukupi permintaan, industri pengolahan susu lokal terus berkembang. Produk olahan susu seperti yoghurt, keju, susu pasteurisasi, susu sterilisasi dan susu UHT semakin populer di pasar domestik. Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar, tetapi upaya untuk meningkatkan produksi lokal terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kualitas dan produktivitas peternakan sapi perah serta pengembangan unit usaha pengolahan susu.

Regulasi dan standar mutu juga menjadi fokus penting dalam industri peternakan. Regulasi dan deregulasi serta penyusunan standar dilaksanakan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait utamanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Otoritas Kompeten Organik, Lembaga Sertifikasi Organik, dan Kementerian Kesehatan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan bagi tatacara produksi pangan yang baik, serta penerapan jaminan mutu. Pengawasan terhadap unit usaha dan produk peternakan untuk penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan bersama-sama BPOM, Satgas Pangan dan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sertifikasi halal menjadi prioritas untuk memastikan penjaminan produk halal bagi konsumen.

Peran teknologi digital juga semakin penting dalam distribusi produk peternakan. Platform ecommerce dan digitalisasi logistik sudah banyak dikembangkan, dan dapat menyiapkan informasi bagi perencanaan produksi. Hal ini juga mendorong, pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)* untuk memantau kesehatan hewan dan meningkatkan produktivitas, atau *smart farm*. Pengolahan dan sistem

distribusi yang baik, serta akses pasar yang meningkat diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan produksi budidaya peternakan dan penumbuhan usaha baru baik budidaya maupun pasca panen dan pengolahan. Untuk itu, diperlukan kemudahan perizinan berusaha, akses pembiayaan usaha, dan insentif investasi usaha peternakan.

Berdasarkan sistem informasi unit pengolahan hasil peternakan (SiUPIN), pada tahun 2024 jumlah UMKM pengolahan daging sapi sebanyak 805 unit, daging dan telur unggas dan aneka ternak sebanyak 604 unit, susu sebanyak 401 unit, hasil ikutan ternak sebanyak 256 unit, dan pengolahan limbah sebanyak 361 unit.

1.1.3. Penjaminan Mutu Hasil Peternakan

Penjaminan mutu hasil peternakan merupakan seluruh upaya sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk asal ternak yang beredar dan dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, dan kehalalan sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem penjaminan mutu mencakup rangkaian kegiatan mulai dari produksi di tingkat peternak, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran produk akhir. Penjaminan mutu sangat penting untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pangan asal hewan yang aman, bermutu, sehat, layak konsumsi, dan halal (ASUH), serta untuk memperkuat daya saing produk peternakan di pasar domestik dan internasional.

Produk peternakan memiliki karakter mudah rusak (*perishable*), rentan terhadap cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta membutuhkan rantai pasok dingin (*cold chain*) yang baik. Oleh karena itu, penjaminan mutu tidak hanya terkait persyaratan teknis produk, tetapi juga sistem manajemen mutu di unit usaha, perilaku higienitas tenaga kerja, kecukupan fasilitas, serta efektivitas pengawasan petugas yang kompeten.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan memegang peranan strategis dalam penjaminan mutu hasil peternakan melalui pendampingan penerapan, pengawasan dan sertifikasi mutu hasil peternakan, dengan rincian aktivitas berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pendampingan penerapan standar mutu di unit usaha (UPH), pengawasan mutu produk siap edar, fasilitasi sertifikasi mutu, serta kerjasama penjaminan mutu dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait seperti BPOM, BPJPH, Kementerian Kesehatan, BSN, pemerintah daerah dan Lembaga Sertifikasi Mutu.

Sistem penjaminan mutu produk peternakan meliputi standar proses dan standar produk. Standar proses mencakup penerapan praktik budidaya dan penanganan yang baik seperti *Good Farming Practices* (GFP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control*

Points (HACCP). Standar produk meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM)/standar lainnya untuk berbagai komoditas peternakan, seperti susu, daging, telur, madu, dan sarang burung walet. Selain itu, untuk menjamin aspek kehalalan, unit usaha harus memenuhi persyaratan proses halal dan sertifikasi halal sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pemerintah terus mendorong penerapan sistem mutu berbasis risiko (*risk-based system*), termasuk *riskbased inspection* (RBI) dan *riskbased sampling* (RBS), sehingga pengawasan dilakukan secara proporsional dan efektif sesuai tingkat risiko unit usaha. Digitalisasi sistem mutu juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan ketertelusuran (*traceability*), akuntabilitas, dan keterhubungan data mutu nasional. Di sisi lain, fasilitasi sarana prasarana seperti unit pengolahan hasil (UPH), alat/mesin pengolahan, fasilitas sanitasi, dan peralatan rantai dingin turut menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan mutu di lapangan, terutama untuk UMKM.

Pemenuhan standar mutu, tidak hanya untuk peningkatan daya saing domestik namun juga untuk pasar ekspor. Untuk tujuan ekspor, pemenuhan mutu sangat tergantung kepada persyaratan mutu negara yang dituju. Persyaratan mutu negara tujuan ekspor sering kali lebih ketat, tidak hanya pemenuhan higiene sanitasi (yang dibuktikan dengan sertifikasi veteriner) namun juga persyaratan kandungan nutrisi tertentu, standar residu, penelusuran asal (*traceability*) dan/atau persyaratan terkait *sustainability*, seperti organik. Penjaminan mutu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah produk di pasar domestik, membuka akses pasar baru dan mempertahankan pasar ekspor yang sudah ada.

Capaian Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam pembinaan dan pendampingan penjaminan mutu hasil peternakan tahun 2016-2025 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Pembinaan dan Pendampingan Penjaminan Mutu Hasil Peternakan Tahun 2016-2025

No	Izin edar / sertifikat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jml
1	MD BPOM	6	9	2	10	4	4	4	1	2	2	44
2	PIRT	6			1		1					8
3	No Pendaftaran Pupuk Organik / Izin Edar				1					1	2	4
4	Sertifikat Organik produk pangan				2			1				3
5	Sertifikat Organik non pangan (pupuk organik)				4	3	4	2	6	12		31
	TOTAL	12	9	2	18	7	9	7	7	15	2	90

Ijin MD (Makanan Dalam) adalah pemenuhan standar mutu berupa nomor izin edar dari BPOM kepada pangan olahan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, serta telah melalui proses evaluasi, inspeksi sarana produksi, dan penilaian label pangan oleh BPOM. Ditjen PKH telah bekerjasama dengan BPOM dalam melakukan pendampingan pemenuhan ijin edar MD untuk UPH peternakan binaan sejak tahun 2016.

Sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah nomor izin edar yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha pangan skala kecil/rumah tangga yang memproduksi pangan olahan dengan risiko rendah menengah dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, sanitasi, dan label. Sertifikasi PiRT adalah ijin edar untuk produk olahan yang memiliki daya simpan lebih dari 7 hari dan tidak membutuhkan cold chain dalam distribusinya.

Sertifikasi organik adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang terakreditasi, yang menyatakan bahwa produk, proses produksi, atau sistem manajemen telah memenuhi standar organik sesuai SNI 6729 Tahun 2025 tentang Sistem Pertanian Organik. Sedangkan untuk produk non pangan (pupuk organik), persyaratan mutu yang pendampingan penerapan dan fasilitasi mutu untuk UMKM/UPH binaan Ditjen PKH, melalui fasilitasi sarana prasarana, bimbingan teknis, fasilitasi pembiayaan uji mutu/uji efektivitas produk, fasilitasi pembiayaan pendaftaran, serta pendampingan pembuatan SOP (dokumen sistem mutu) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan pasar dan konsumen terhadap produk hewani yang aman dan berkualitas, peran penjaminan mutu hasil peternakan akan menjadi semakin strategis. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan regulasi, harmonisasi standar, sinergi pengawasan, serta digitalisasi sistem mutu diharapkan menjadi motor utama untuk menjamin tersedianya produk peternakan yang bermutu, aman, halal, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi.

1.1.4. Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan data BKPM, perkembangan investasi subsektor peternakan dapat dilihat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN subsektor peternakan tumbuh sebesar 21,94% per tahun, dan investasi PMA subsektor peternakan tumbuh sebesar 9,57% per tahun pada periode tahun 2020-2023. Pada tahun terakhir periode 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama s.d. September, investasi PMDN meningkat 40,54% dan PMA meningkat 70,47%.

Tabel 3. Investasi Subsektor Peternakan, 2020-2024

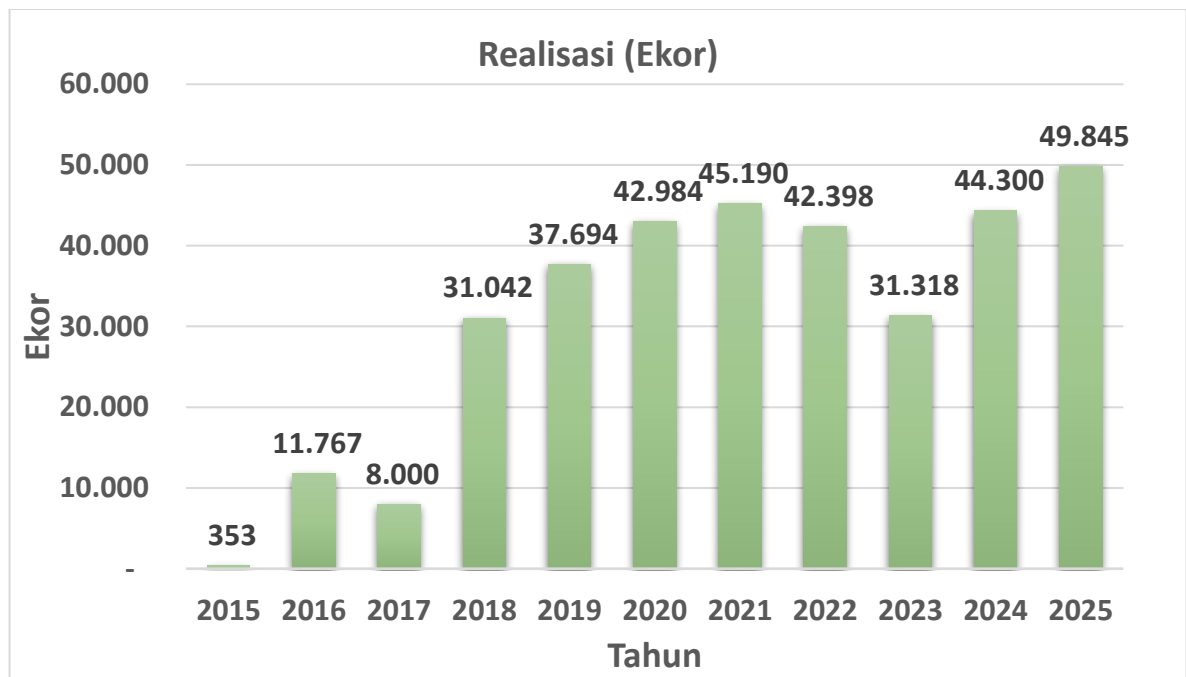
Uraian	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan 2020-2023 (%/tahun)	2023*	2024*	Investasi 2024* dibandingkan 2023* (%)
PMA (US\$ Juta)	44,44	28,56	43,71	48,69	9,57	20,69	23,82	15,12
PMDN (Rp Trilyun)	2,28	2,14	3,91	3,49	21,94	2,71	4,35	60,58

1.1.5. Pemasaran Hasil Peternakan

Pemasaran hasil peternakan memegang peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan investasi serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Penguatan sistem pemasaran juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, stabilitas harga dan kemampuan produk peternakan dalam bersaing dipasar domestik maupun internasional. Perubahan pola konsumsi, tuntutan standar mutu, perkembangan teknologi digital serta dinamika perdagangan internasional menuntut strategi pemasaran yang adaptif dan berorientasi ekspor.

Upaya peningkatan efisiensi pemasaran dipasar domestik dilakukan melalui optimalisasi tata niaga seperti kapal ternak, pasar ternak dan rantai dingin, pemanfaatan platform digital, peningkatan literasi pemasaran bagi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar melalui sistem informasi mekanisme pemantauan harga secara berkala sekaligus untuk memastikan stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus menjamin keberlanjutan usaha peternak.

Optimalisasi tata niaga melalui kapal ternak dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan nasional swasembada daging sapi dan kerbau, menjamin kelangsungan distribusi dengan jadwal tetap dan teratur untuk membantu peternak sapi dalam hal kepastian waktu sehingga dapat mengirimkan ternak hasil produksinya ke daerah konsumen dengan tetap memenuhi aspek kesejahteraan hewan.



Keterangan: Data Per 31 Desember 2025
 Sumber : Kemenhub dan Direktorat Hilirnak

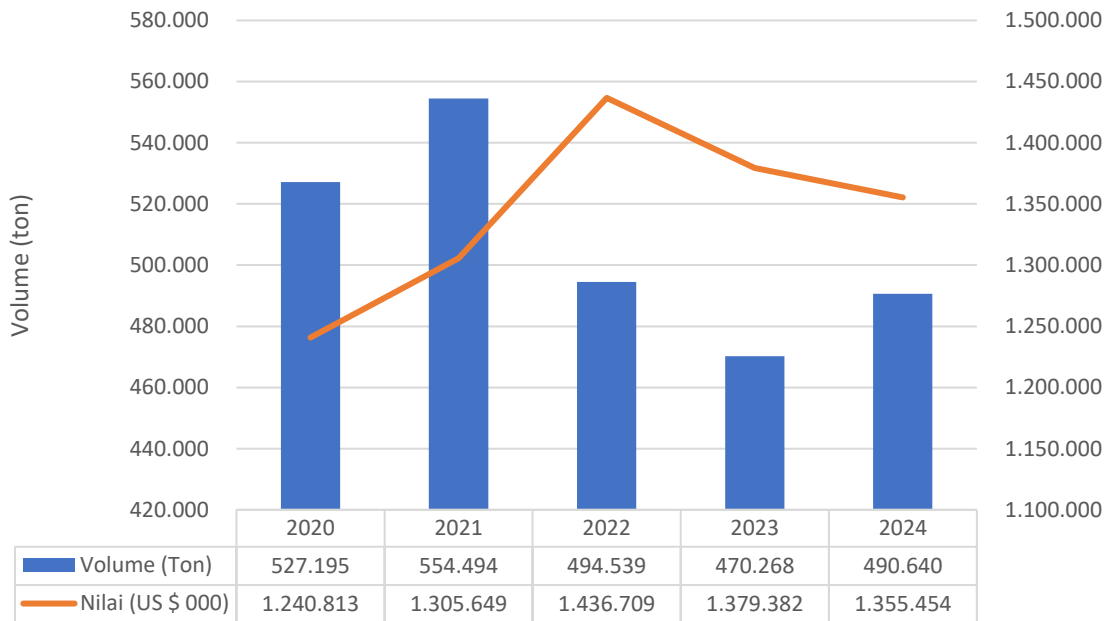
Gambar 2. Grafik Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025

Pada tahun 2015-2017 hanya ada 1 unit kapal ternak yang beroperasi dan mulai tahun 2018 bertambah menjadi 6 unit kapal dengan total angkut sebanyak 337.103 ekor dengan *loading factor* rata-rata 94,23%. Jumlah muatan rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022 mulai terjadinya PMK, tahun 2023 PMK masih terjadi PMK dan docking kapal ternak. Intensitas muatan rutin terbanyak ke Kalimantan sedangkan tujuan DKI Jakarta meningkat saat Idul Adha.

Perluasan pasar ekspor dan penguatan diplomasi perdagangan menjadi salah satu fokus kedepan. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi peluang pasar berbasis analisis daya saing, harmonisasi persyaratan teknis dan non teknis dengan negara mitra, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi serta pendampingan terhadap calon eksportir, penguatan kompetensi pelaku usaha dan aparatur, peningkatan peran UPT dan dinas daerah. Selain itu promosi dagang, partisipasi dalam pameran skala internasional dan penguatan kerja sama antar negara diarahkan untuk membuka akses pasar bagi komoditas peternakan potensial.

Berdasarkan data BPS dan Pusdatin Kementan, rata-rata pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024-2024 tumbuh sebesar 2,38% sedangkan rata-rata volume ekspor turun 1,55%. Hambatan pertumbuhan ekspor salah satunya disebabkan adanya outbreak penyakit PMK sehingga komoditas ekspor seperti kambing/domba dan produk turunan dari sapi terhenti dan terhambat ekspor, kemudian munculnya penyakit ASF pada babi menyebabkan ekspor babi dari Pulau Bulan ke Singapura

terhenti. Kinerja ekspor peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 tahun terakhir sebagai mana terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 3. Grafik Realisasi Ekspor Peternakan Tahun 2020-2024

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2020-2024

Pada periode 2020-2024, Eselon II yang membidangi fungsi investasi, pengolahan dan pemasaran adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berubah menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pada periode 2020-2024 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi dengan membandingkan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan, kendala maupun permasalahan dalam mencapai target kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi berikutnya.

Menyesuaikan dengan perubahan rencana strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Direktorat Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis pada tahun 2020-2025 yang berdampak pada perubahan sebagian indikator kinerja. Penjelasan terhadap urgensi penyesuaian tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi I Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024 ditetapkan Desember 2020 menyelaraskan dengan Revisi Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 untuk indikator dan targetnya.
- b. Revisi II Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024 ditetapkan Desember 2021.
- c. Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Perencanaan Nomor B 1488/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan Tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menambah sasaran dan indikator kinerja RB ke dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Tabel 4. Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Periode
1.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Nilai ekspor hewan hidup	2020-2022
		2. Nilai ekspor pangan segar dan olahan	2020-2022
		3. Nilai ekspor produk non pangan	2020-2022
		4. Nilai ekspor obat hewan;	2020-2022
		5. Nilai ekspor benih dan bibit ternak	2020-2022
		6. Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan	2023-2024
		7. Pertumbuhan unit usaha peternakan.	2020-2024
2.	Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	1. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	2020
3	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	1. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	2021-2024
4	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	2024

Hasil evaluasi kinerja sasaran strategis periode 2020-2024 menunjukkan bahwa secara umum berhasil. Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada tahun 2020 termasuk kriteria berhasil, dimana maka 5 (lima) indikator kinerja termasuk kriteria sangat berhasil dengan capaian lebih besar dari 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja termasuk kriteria berhasil (83,87%), serta 1 indikator yang termasuk kriteria kurang berhasil (23,63%). Indikator kinerja dimaksud dan capaiannya meliputi: 1) Pertumbuhan unit usaha peternakan 160%; 2) Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan 121,79%; 3) Nilai ekspor hewan hidup 105,97%; 4) Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 106,95%; (5) Nilai ekspor obat hewan 102,70%; 6) Nilai ekspor produk non pangan 83,87%; dan 7) Nilai ekspor benih dan bibit ternak 23,63%.

Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada tahun 2021 termasuk kriteria berhasil, yaitu 3 (tiga) indikator kinerja termasuk kriteria sangat berhasil dengan capaian lebih besar dari 100%, 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria berhasil dengan capaiannya 94,05% dan 86,56%, 1 (satu) indikator termasuk kriteria cukup berhasil dengan capaian 79,87%, serta 1 (satu) indikator yang termasuk kriteria kurang berhasil dengan capaian 20,54%. Indikator kinerja dimaksud dan capaiannya meliputi: 1) Nilai ekspor obat hewan 334,48%; 2) Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan 113,27%; 3) Pertumbuhan unit usaha peternakan 12,36%; 4) Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 94,05%; 5) Nilai ekspor produk non pangan 86,56%; 6) Nilai ekspor hewan hidup 79,87%; dan 7) Nilai ekspor benih dan bibit ternak 20,54%.

Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada tahun 2022 termasuk kriteria sangat berhasil, 4 (empat) indikator kinerja termasuk kriteria sangat berhasil dengan capaian lebih besar dari 100%, dan 3 (tiga) indikator kinerja termasuk kriteria berhasil dengan capaiannya 100,00%, 95,57% dan 80,23%. Indikator kinerja dimaksud dan capaiannya meliputi: 1) nilai ekspor obat hewan 819,65%; 2) nilai ekspor benih dan bibit ternak 210,18%; 3) nilai ekspor produk pangan segar dan olahan 108,63%; 4) tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 100,22%; 5) pertumbuhan unit usaha peternakan 100,00%; 6) nilai ekspor produk non pangan 95,57%; serta (7) nilai ekspor hewan hidup 80,23%.

Capaian sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2023 termasuk kriteria sangat berhasil dengan indikator kinerja dan capaiannya meliputi: 1) nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan 131,36%; 2) tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 100,64%, dan 3) pertumbuhan unit usaha peternakan 100%.

Selanjutnya, capaian sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 juga sangat berhasil dengan capaian diatas 100% pada 2 (dua) indikator: 1) nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan (114,47%); 2) Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (107,14%); dan capaian 100% pada indikator: 1) pertumbuhan unit usaha peternakan (100%); dan 2) tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (100%).

Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor penentu baik yang berasal dari lingkungan internal, diantaranya peningkatan kualitas SDM aparatur, efektivitas pelaksanaan anggaran, perbaikan regulasi, ketepatan sasaran program/kegiatan, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal seperti dukungan kebijakan, dukungan lintas sektor maupun penguatan kerjasama dalam dan luar negeri. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan telah melakukan berbagai terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan. Upaya dan tindak lanjut yang harus terus dilakukan ke depan berdasarkan evaluasi kinerja periode 2020-2024 untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan kedepan, meliputi:

- a. Sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan;
- b. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan pangan dan non pangan;
- c. Sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan penerapan mutu hasil peternakan pangan dan nonpangan.
- d. Penguatan pengawasan dan fasilitasi sertifikasi mutu produk peternakan.
- e. peningkatan kerjasama dengan K/L terkait (BPOM, BPJPH, BSN) dalam aspek pemenuhan standar mutu, pengawasan, dan sertifikasi mutu;
- f. meningkatkan promosi usaha dan produk peternakan;
- g. fasilitasi dan pendampingan akses pasar hasil peternakan di pasar domestik dan ekspor;
- h. optimalisasi peran Satgas Pengawas Kemitraan Usaha Peternakan pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan;
- i. fasilitasi akses pembiayaan usaha peternakan baik kredit program maupun sumber pembiayaan lainnya;
- j. pengembangan investasi melalui regulasi dan deregulasi serta kemudahan perizinan berusaha berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait;

- k. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya peningkatan ekspor dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya;
- l. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan negara tujuan ekspor dalam mengawal percepatan penyelesaian hambatan G to G antar negara;
- m. mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan dengan penyediaan skema insentif investasi;
- n. melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka sinergitas dan optimalisasi sumber daya;
- o. memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan usaha peternakan yang melibatkan instansi/pemangku kepentingan terkait serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada pembangunan hilirisasi hasil peternakan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal. Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan metode SWOT untuk memilih aspek-aspek internal dan eksternal strategis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

1.3.1. Potensi

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan hilirisasi hasil peternakan antara lain peningkatan jumlah penduduk yang besar, perubahan gaya hidup (bahan baku/produk hasil peternakan siap masak), tersedianya sumber pangan lokal hasil peternakan dan keanekaragaman produk hasil peternakan, pangsa pasar dalam dan luar negeri, serta dukungan *stakeholders*.

a. Jumlah Rumah Tangga Peternakan dan Jumlah Penduduk yang Besar

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) RTUP sebanyak 12.047.389 RT. Dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang peternakan dan telah dimulainya peternakan presisi di beberapa perusahaan dan peternak mitranya, diharapkan ke depan lebih banyak generasi muda yang menjadikan usaha peternakan sebagai sumber pendapatan utama, baik dalam usaha di hulu, produksi maupun di hilir.

b. Peningkatan Produksi dan Produktifitas

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dengan

meningkatkan produksi sumber pangan bergizi seperti daging, telur, dan susu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Populasi ternak penghasil daging, telur, dan susu perlu ditingkatkan melalui program pembibitan dan budidaya yang baik. Untuk itu, investasi untuk peningkatan skala usaha dan efisiensi, serta penambahan unit usaha baru di sektor peternakan dari hulu sampai hilir harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

c. Peningkatan konsumsi sumber protein hewani dan perubahan gaya hidup

Peningkatan permintaan sumber protein hewani merupakan potensi dan peluang meningkatkan permintaan produk hasil peternakan. Dalam pemenuhan sumber protein hewani yang berasal dari produk hasil peternakan baik berupa daging sapi dan ayam, telur dan susu akan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap ketiga produk tersebut. Daging sapi dan susu saat dalam pemenuhan reguler terdapat defisit 52% dan susu 79% ditambah dengan kebutuhan MBG akan meningkatkan permintaan terhadap produk hasil peternakan.

Selain target pemenuhan gizi asal ternak, potensi diversifikasi produk juga dapat disebabkan dengan perubahan gaya hidup. Saat ini para ibu rumah tangga yang memiliki tingkat kesibukan tinggi tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan menu makanan sehingga makanan yang berasal dari produk hasil peternakan siap masak yang meningkat cukup tajam permintaannya. Seperti daging marinasi atau produk hasil peternakan yang sudah dibumbui lebih banyak di cari dari pada produk hasil peternakan yang masih berupa karkas utuh.

d. Sumber Pangan Lokal Hasil Peternakan dan Keanekaragaman Produk Hasil Peternakan.

Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan) Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar di wilayah-wilayah yang sangat heterogen berpotensi untuk menghasilkan berbagai ragam produk olahan hasil ternak. Hal ini merupakan kekuatan dalam penyediaan produk peternakan kepada konsumen atau masyarakat secara lebih luas, tidak terbatas pada sentra produksi saja, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil peternakan.

Beragamnya ketersediaan produk olahan pangan asal ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak, dengan kemudahan distribusi dan meningkatnya daya simpan produk.

Seiring meningkatnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan regulasi penjaminan mutu melalui pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu pada pelaku usaha serta mendorong sertifikasinya. Peningkatan mutu produk UPH dilakukan dengan peningkatan sosialisasi standar mutu, bimbingan teknis, pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu, pengawasan mutu produk beredar/siap edar, fasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan kerjasama dengan K/L terkait (BPOM, BPJPH, BSN) dalam upaya peningkatan UPH yang memenuhi standar mutu dan mendapatkan ijin edar.

e. Efisiensi dan Hilirisasi Produk Peternakan

Efisiensi dan hilirisasi produk peternakan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk asal ternak. Dengan memangkas rantai distribusi, harga jual produk di tingkat peternak dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan peternak. Hilirisasi produk peternakan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan, seperti pengolahan daging, susu, telur, madu dan sarang burung walet menjadi produk bernilai tambah, juga dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pasca panen, pengolahan serta sistem pemasaran dan distribusi dapat membantu mengoptimalkan efisiensi sektor peternakan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha peternakan hulu sampai hilir.

f. Penjaminan Mutu Hasil Peternakan

Penjaminan mutu hasil peternakan penting untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memenuhi standar mutu nasional (SNI/PTM/standar lainnya) maupun internasional/negara tujuan ekspor. Produk peternakan yang beredar/siap edar harus memenuhi persyaratan mutu. Di sisi lain, produk peternakan Indonesia juga harus memenuhi standar mutu untuk ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Penjaminan mutu produk peternakan, mulai dari hulu hingga hilir, harus dilakukan secara konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk peternakan yang bermutu, aman dan halal.

g. Peningkatan daya saing peternakan

Peningkatan daya saing peternakan melalui investasi dan pengembangan usaha subsektor peternakan:

- 1) Peningkatan investasi subsektor peternakan melalui promosi investasi, pendampingan investasi, dan penyediaan insentif investasi;
- 2) Aksesibilitas permodalan (peningkatan skala usaha dan/atau pendapatan peternak);
- 3) Peningkatan kelembagaan peternak (semula sendiri2 menjadi berkelompok/koperasi/asosiasi) sehingga net working peternak meningkat dan meningkatkan pemasaran atau kemudahan supply bahan baku baik bibit/pakan dan saspras lainnya);
- 4) Aksesibilitas mitigasi resiko (untuk mengurangi resiko usaha peternak dari kematian dan kehilangan);
- 5) Perbaikan kemitraan (perbaikan pelaksanaan kemitraan sehingga peternak tidak selalu dirugikan oleh perusahaan ini).

h. Pangsa Pasar Dalam dan Luar Negeri (Ekspor)

Jumlah penduduk yang semakin meningkat, peningkatan pendapatan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani yang bermutu, akan terus meningkatkan pasar dalam negeri. Begitu juga secara global, hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar ekspor produk peternakan yang meningkat pada periode 2020-2024.

Peningkatan produksi dan surplus utamanya pada produksi daging dan telur ayam menjadi peluang untuk pasar ekspor. Produksi sarang burung wallet diperkirakan terus akan naik dengan banyaknya pelaku usaha yang berminat melakukan usaha rumah burung wallet, fasilitasi peningkatan akses pasar ekspor sangat dibutuhkan dalam upaya keberlanjutan usaha ini.

Percepatan peningkatan ekspor dapat dilakukan: (i) melakukan identifikasi potensi produk siap ekspor dan identifikasi potensi negara tujuan ekspor; (ii) melakukan misi dagang, promosi dan temu bisnis antara pelaku usaha ekspor di negara tujuan potensi; (iii) melakukan koordinasi dengan kedutaan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan G to G antar negara; (iv) Melakukan pendampingan pemenuhan dokumen ekspor dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait; dan (v) melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor untuk promosi produk dalam pameran yang bersifat internasional dan mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pola kemitraan yang cocok untuk kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas ketersediaan ternak atau produk peternakan.

Selain itu, peningkatan efisiensi substitusi impor dan pengendalian impor melalui Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT) sesuai peraturan WTO harus dilakukan untuk melindungi peternak lokal.

i. Dukungan *Stakeholders*.

Tujuan pembangunan hilirisasi hasil peternakan tidak akan tercapai dengan baik tanpa sinergitas dengan *stakeholders*. Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta (termasuk peternak) dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupakan modal penting dalam memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha peternakan. Peternak sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan kemitraan peternakan sesuai dengan prinsip kemitraan.

Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian menghasilkan inovasi dan teknologi tepat guna untuk memaksimalkan manfaat sumber daya peternakan yang ada, dalam upaya peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk peternakan. Berbagai varietas ternak unggul, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bioteknologi, aneka teknologi budidaya, teknologi pakan, pasca panen dan pengolahan yang telah tersedia untuk didesiminasi kepada peternak dan pelaku usaha lainnya. Untuk mendukung adopsi teknologi oleh peternak diperlukan dukungan permodalan selain desiminasi teknologi secara intensif.

1.3.2. Permasalahan

a. Usaha peternakan yang bersifat subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak Ruminansia besar dan kecil. Hampir 95% rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Sebagian besar rumah tangga peternak memiliki usaha peternakan skala usaha mikro dan kecil, sehingga belum memenuhi skala kelayakan usaha. Fasilitasi permodalan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan masing-masing jenis ternak sangat diperlukan untuk naik kelas, selain untuk meningkatkan skala usaha juga untuk adopsi teknologi tepat

guna. Di sisi lain, usaha peternakan menggunakan komponen utama produksi adalah ternak yang merupakan makhluk hidup, kematian ternak akan berakibat pada keberlangsungan usaha, untuk itu selain tata cara budidaya yang baik, asuransi ternak sangat diperlukan dalam menjamin keberlanjutan usaha.

Untuk meningkatkan daya saing usaha, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan. Korporasi Peternak dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak, dan dikembangkan untuk pengelolaan peternakan berorientasi bisnis dalam satu manajemen secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Selain itu, penting untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi para peternak, agar berorientasi pada bisnis sehingga usahanya lebih efisien dan berorientasi pasar.

b. Akses permodalan pelaku usaha

Skema permodalan bagi pelaku usaha UMKM belum sesuai dengan karakteristik usaha subsektor peternakan sehingga tingkat akses permodalan UMKM rendah. Hal ini mengakibatkan skala usaha peternak secara mikro kecil susah untuk berkembang atau meningkatkan skala usahanya.

Insentif bagi pelaku usaha peternakan masih belum menarik para pemilik modal besar untuk menanamkan modalnya pada bidang peternakan, selain itu belum ada skema khusus peternakan bagi pelaku usaha besar yang merupakan daya tarik bagi para investor besar.

c. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha pembibitan dan pembiakan ternak

Pemerintah telah memfasilitasi pelaku usaha dalam mendorong investasi usaha pembibitan dan pembiakan ternak antara lain dengan kemudahan perizinan usaha dan insentif pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*). Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan pelaku usaha dalam pembibitan dan pembiakan ternak masih rendah, terutama untuk ternak ruminansia.

d. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah masih sedikitnya lahan khusus peternakan dalam penetapan fungsi lahan untuk peternakan. Untuk pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha dapat dilakukan pengalihan fungsi lahannya, hal ini membuat para pelaku usaha peternakan belum memiliki kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan. Banyak usaha peternakan yang tergusur karena berkembangnya pemukiman penduduk. Permasalahan juga dijumpai oleh calon investor bidang usaha

peternakan dalam mencari lahan untuk usaha. Tidak mudah mendapatkan lahan dengan status yang *clear and clean*.

Saat ini fungsi lahan yang sudah ada adalah lahan pertanian yang digunakan untuk sawah dan/atau untuk tanaman pangan, untuk farm peternakan belum ada khusus. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Dukungan kementerian/lembaga lain yang berwenang dalam pengaturan dan pemanfaatan lahan sangat diperlukan.

e. Promosi usaha bidang peternakan

Upaya untuk menarik para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya pada subsektor peternakan atau memperluas usaha yang dimiliki belum optimal dilaksanakan sehingga usaha subsektor peternakan belum menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi prioritas usaha.

f. Kesiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar

Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi dunia. Negara lain berlomba-lomba untuk masuk pasar Indonesia, sehingga pemanfaatan pasar domestik secara optimal merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti meat meal dan bone meal, tepung ikan, jagung dan berbagai feed suplement pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.

Ketahanan pangan produk asal hewan harus dijaga untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun, produk peternakan lokal sering kalah saing dengan produk impor yang lebih murah, menyebabkan

penurunan minat berusaha di bidang peternakan. Potensi konflik dalam rantai distribusi juga perlu diatasi untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

g. Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional

Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan produk peternakan dan kesehatan hewan melalui reorientasi terhadap kebijakan perdagangan. Dalam upaya akselerasi ekspor produk peternakan masih menghadapi kendala, antara lain adalah masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa tujuan ekspor, khususnya bagi negara yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu; terbatasnya informasi market akses dari para pelaku ekspor, dan belum adanya buyer/permintaan di luar negeri; dan sulit mendapatkan perijinan di negara tujuan (izin impor) dan pemenuhan dokumen ekspor yang diminta oleh negara tujuan.

h. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi peternakan, seperti penurunan produktivitas tanaman sumber pakan dan peningkatan kerentanan ternak terhadap penyakit. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi, produktifitas ternak dan mutu dan kemananan hasil peternakan

i. Manajemen Anggaran dan Program

Perubahan struktur anggaran dapat terjadi dikarenakan wabah penyakit dan dampak bencana alam, sehingga seringkali mengganggu program program peternakan yang sudah direncanakan. Refocusing program diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan yang mendesak. Disamping permasalahan terkait refocusing anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat juga sering menjadi tantangan tersendiri, seperti kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak para pembiayaan program yang telah direncanakan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertanian Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- b. Pertanian Maju Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas

pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

- c. Pertanian Berkelanjutan Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah berkelanjutan. melalui penerapan pertanian
- d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
 - 2) Pertanian bermanfaat kesejahteraan petani. dalam meningkatkan
 - 3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
 - 4) Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon I dibawah Kementerian Pertanian mendukung kedua visi tersebut dengan:

“Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia“

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung dengan visi:

“Hilirisasi Hasil Peternakan yang Berdaya Saing, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan“

Hilirisasi hasil Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspo serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha peternakan dengan ramah lingkungan. Daya saing subsektor

peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan. Pengembangan subsektor peternakan Indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat sesuai perkembangan kebutuhan dalam jumlah dan kualitas yang baik. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

2.2. Misi

Sesuai dengan visi nasional, Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal PKH maka misi yang harus dilakukan oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan periode 2025-2029 adalah penciptaan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan.

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing dapat dicapai melalui daya saing usaha peternak (peningkatan efisiensi usaha dan permodalan), daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha dan didukung dengan peningkatan akses pasar. Misi dari Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan usaha peternakan
- 2) Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui pascapanen dan pengolahan
- 3) Meningkatkan hasil peternakan yang bermutu dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan daya saing pemasaran hasil peternakan di pasar domestik dan ekspor

Potensi basis komoditas dan produk unggulan subsektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Beberapa langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Indonesia, antara lain melalui:

- 1) Peningkatan usaha peternakan dengan peningkatan kapasitas/skala usaha, penyediaan skema permodalan, pengembangan asuransi ternak, pengembangan investasi;

- 2) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, desiminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran);
- 3) Pengembangan dan penerapan standar mutu dan penerapan tata cara pasca panen dan pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi; serta
- 4) Pengembangan pasar domestik dan internasional.

2.3. Tujuan

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, yaitu: ***“Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing”***

Produk peternakan harus bernilai tambah dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi produk peternakan tersebut dan meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai peternakan, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- 1) Meningkatnya Mutu Hasil Peternakan (IKSP Indeks Mutu komoditas peternakan (Indeks))
- 2) Meningkatnya Volume Ekspor hasil peternakan (IKSP Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan (Ton)).
- 3) Meningkatnya Pengolahan Hasil Peternakan (IKSP Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (Indeks)).

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2025-2029. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator Tujuan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Hilirisasi hasil peternakan yang berdaya saing, bernilai tambah dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan usaha peternakan 2. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui pascapanen dan pengolahan 3. Meningkatkan hasil peternakan yang bermutu dan berkelanjutan 4. Meningkatkan daya saing pemasaran hasil peternakan di pasar domestik dan ekspor 	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks mutu komoditas peternakan (Indeks) 2. Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan (Ton)

			3. Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (Indeks)
--	--	--	---

2.4. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional, sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Sasaran Program ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi sasaran kegiatan.

Sasaran Kegiatan terkait Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Pertanian pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, dimana Sasaran Program (SP) merupakan kinerja strategis subsektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap *final outcome*.

Pohon kinerja Ditjen PKH tahun 2025-2029 terkait Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	Indeks Harga yang diterima peternak (Indeks)	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapatkan usaha peternakan (%)
Terjaminnya mutu komoditas peternakan	Indeks Mutu komoditas peternakan (Indeks)	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar (%)
			Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian (%)
Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan	Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan (Ton)	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan (%)

Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (Indeks)	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan (%)
		Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)

2.4.1. Sasaran Program

Program Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, mendukung 4 (empat) indikator kinerja sasaran program Ditjen PKH. Keempat sasaran program (SP) dan indikator kinerja sasaran program (IKP) Ditjen PKH yaitu:

Sasaran Program 1 : Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak

Perkembangan harga rata-rata produk peternakan yang diterima oleh peternak dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan perubahan harga jual produk peternakan seperti daging, telur, susu. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa peternak menerima harga yang lebih baik untuk produk mereka.

Sasaran Program ini diukur melalui indikator **Indeks harga yang diterima peternak**. Indeks harga yang diterima peternak adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga komoditas hasil ternak yang diterima oleh peternak dalam suatu periode waktu tertentu. Jika indeks meningkat, harga yang diterima peternak mengalami kenaikan dibandingkan tahun dasar, dan sebaliknya. Cakupan hanya berfokus pada harga yang diterima oleh peternak kecil dan menengah bukan perusahaan besar. Komoditas yang dihitung didalamnya adalah ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak (sesuai dengan kuisisioner BPS).

Sasaran Program 2 : Terjaminnya mutu komoditas peternakan

Sasaran program terjaminnya mutu komoditas peternakan ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan mutu terhadap komoditas peternakan melalui pendampingan penerapan dan pengawasan standar mutu hasil peternakan secara konsisten di seluruh rantai pasok. Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan kesesuaian produk hasil peternakan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) serta ketentuan atau standar mutu yang berlaku lainnya.

Upaya pencapaian sasaran dilakukan melalui kegiatan pendampingan penerapan dan pengawasan terhadap pelaku usaha hasil peternakan, penguatan laboratorium

pengujian mutu, peningkatan sistem sertifikasi mutu, serta pengembangan sistem jaminan mutu dan ketertelusuran (*traceability*) produk hasil peternakan. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan mutu komoditas peternakan nasional dapat terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk peternakan Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional.

Sasaran program ini diukur melalui indikator **Indeks Mutu Komoditas Peternakan**, yang merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas produk peternakan berdasarkan parameter mutu (fisik, kimia, atau biologis yang relevan). Indeks ini dihitung dengan membandingkan nilai karakteristik produk terhadap standar mutu acuan, sehingga mencerminkan kesesuaian mutu produk dengan kriteria yang ditetapkan. Standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar lain yang relevan. Jenis komoditas dalam pengukuran indeks mutu adalah daging, susu, telur, madu, SBW, pupuk organik.

Sasaran Program 3 : Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan

Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan peningkatan jumlah komoditas peternakan yang berhasil diekspor ke negara tujuan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan peran pemerintah dan stakeholder dalam membuka akses pasar, memenuhi persyaratan negara tujuan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan kontribusi subsektor peternakan terhadap nilai perdagangan internasional semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok produk peternakan yang berdaya saing.

Sasaran Program ini diukur dengan indikator **Volume ekspor komoditas peternakan**. Indikator ini menggambarkan total volume komoditas peternakan yang berhasil diekspor dalam periode tertentu yaitu kelompok komoditas hewan hidup, produk pangan, produk non pangan, obat hewan serta benih dan bibit ternak sesuai dengan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan teknis negara tujuan. Secara strategis, indikator volume ekspor komoditas peternakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan devisa negara sekaligus mendukung pengembangan produk peternakan berdaya saing global.

Sasaran Program 4 : Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi

Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan keberhasilan

upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah produk ternak dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah melalui pengolahan, diversifikasi, dan/atau penguatan rantai pasok, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor atau mengurangi ketergantungan impor.

Sasaran program ini diukur melalui indikator **Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan**. Indikator ini mengukur indeks kinerja jumlah komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan parameter adanya peningkatan ketersediaan komoditas unggulan prioritas hasil hilirisasi (volume dan/atau jenis produk), nilai tambah yang didapat pasca hilirisasi komoditas unggulan prioritas, dan rasio komoditas peternakan hasil hilirisasi yang diekspor terhadap total komoditas peternakan unggulan hasil hilirisasi; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan. Komoditas peternakan unggulan meliputi daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan SBW.

2.4.2. Sasaran kegiatan

Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan

Sasaran kegiatan tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan oleh usaha peternakan merupakan upaya strategis untuk menjamin terserapnya produksi peternakan nasional secara berkelanjutan. Akses pasar, salah satunya dapat mencakup terbentuknya kemitraan usaha, tersedianya saluran distribusi dan pemasaran, serta kepastian regulasi dan persyaratan teknis yang memungkinkan pelaku usaha peternakan memasarkan produknya secara optimal.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan**. Indikator ini mengukur seberapa efektif usaha peternakan dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia (akses pasar yang didapat) untuk menjual hasil produksinya.

Secara matematis, indikator ini dinyatakan sebagai persentase dengan membandingkan antara total akses pasar yang didapat dibandingkan dengan akses pasar yang dimanfaatkan. Jika persentase tinggi (mendekati 100%) maka terjadi efisiensi dan pemanfaatan pasar yang baik dengan memaksimalkan saluran pemasaran yang tersedia serta kemampuan untuk memenuhi permintaan dari hampir semua akses pasar yang dimiliki.

Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu

Sasaran kegiatan terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu ini dimaksudkan untuk mewujudkan komoditas hasil peternakan yang memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan

meliputi pendampingan penerapan standar mutu di UPH, pengawasan mutu produk peternakan beredar/siap edar, fasilitasi sertifikasi mutu produk untuk UPH peternakan, peningkatan kapasitas SDM pengawas mutu di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM di UPH peternakan dan fasilitasi pengujian mutu produk di laboratorium. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta produk peternakan yang bermutu dan berdaya saing tinggi, serta mampu mendukung peningkatan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk hasil peternakan nasional.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 IKSK yaitu:

a. IKSK 1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar.

Indikator ini merupakan rasio dalam persentase dari komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar mutu (Standar Nasional Indonesia (SNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM) / standar lain yang relevan); dibandingkan dengan total jumlah pengawasan/pengujian mutu hasil peternakan. Produk peternakan yang diawasi merupakan produk hasil peternakan yang diproduksi oleh unit usaha Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan dan telah siap untuk diedarkan. Komoditas produk peternakan meliputi daging, susu, telur, madu, SBW, pupuk organik.

b. IKSK 2 “Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian”.

Indikator ini merupakan rasio dalam persentase dari jumlah pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan; dibandingkan dengan jumlah permintaan pengujian. Komoditas produk peternakan yang dilakukan pengujian meliputi daging, susu, telur, madu, SBW, pupuk organik. Kegiatan pengujian ini dilaksanakan oleh Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan yang terakreditasi. Jumlah komoditas produk peternakan yang telah dilakukan pengujian merupakan total produk yang telah melalui proses uji mutu dan dinyatakan selesai pengujiannya.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor

Secara kegiatan meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor menjadi salah satu prasyarat dalam pemanfaatan akses pasar yang terbuka, peningkatan volume, diversifikasi ekspor, serta penguatan daya saing produk peternakan nasional. Sasaran kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, serta peningkatan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian nasional.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan**. Indikator ini mengukur sejauh mana kesiapan produk peternakan nasional untuk memasuki pasar ekspor dibandingkan dengan total potensi ekspor yang tersedia. Produk siap ekspor merujuk pada komoditas peternakan yang telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, persyaratan teknis serta ketentuan negara tujuan ekspor, sedangkan total potensi ekspor mencakup keseluruhan total volume atau jenis produk peternakan yang berpotensi diekspor.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing

Sasaran kegiatan meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing dicapai dengan upaya meningkatkan jenis dan/atau volume produk olahan hasil peternakan unggulan melalui kegiatan pascapanen dan pengolahan; dengan memperhatikan efisiensi dan preferensi pasar untuk meningkatkan daya saing.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan**. Indikator ini merupakan rasio dalam persentase dari jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan adalah susu, daging, telur, sarang burung walet dan madu.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan ukuran nilai investasi baru maupun perluasan yang berasal dari PMA dan PMDN di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan**. Indikator ini mengukur persentase perkembangan investasi peternakan di bandingkan periode sebelumnya secara kumulatif. Salah satu upaya dalam mendorong peningkatan investasi dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan kepada calon investor maupun investor eksisting yang melakukan perluasan usahanya dengan fasilitasi kemudahan investasi mulai dari pemilihan lahan, perizinan NIB, perizinan dasar (KKPR, PBG-SLF, lingkungan), perizinan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait dengan

pelaksanaan investasi serta penyiapan skema insentif yang dapat dimanfaatkan oleh para investor.

2.4.3. Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSA) ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan kemudian diturunkan (cascading) menjadi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Cascading kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan untuk SK, IKK dan Output disajikan dalam Lampiran 1 dan 2.

Renstra Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan telah memasukan penerapan manajemen risiko lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH merupakan upaya strategis (*strategic direction*) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan strategi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Ditjen PKH meliputi:

Arah Kebijakan 1. Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing, dengan strategi:

- a. Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- b. Perluasan pasar ekspor peternakan dalam meningkatkan market share produk peternakan Indonesia.
- c. Pascapanen dan pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi.
- d. Meningkatkan daya saing produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan
- e. Pengembangan usaha dan Investasi Peternakan

Arah Kebijakan 2. Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional, dengan strategi:

- a. Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
- b. Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
- c. Memastikan ketersediaan pakan yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan pakan populasi ternak
- d. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktifitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak.
- e. Penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan.

Arah Kebijakan 3. Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional, dengan strategi:

- a. Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan
- b. Ketahanan dari penularan penyakit hewan

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dari penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan

Arah Kebijakan 4. Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel, dengan strategi:

- a. Mengembangkan modal manusia (human capital) SDM Ditjen PKH yang produktif.
- b. Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.
- c. Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH
- d. Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi, serta Kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mengacu pada arah kebijakan Direktorat Jenderal PKH, yaitu pada arah kebijakan pertama dan kedua. Untuk itu kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan ditetapkan untuk mendukung kedua arah kebijakan dan strateginya sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1. Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing, dengan strategi:

- a. Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- b. Perluasan pasar ekspor peternakan dalam meningkatkan market share produk peternakan Indonesia.
- c. Pascapanen dan pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi.
- d. Meningkatkan daya saing produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan
- e. Pengembangan usaha dan Investasi Peternakan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses dan efisiensi budidaya seperti pada peningkatan skala usaha, peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Kegiatan yang mendukung meliputi:

- a. Pascapanen dan pengolahan hasil peternakan.
- b. Fasilitas prasarana dan sarana pascapanen dan pengolahan hasil peternakan.
- c. Fasilitas pendampingan investasi peternakan.
- d. Pengembangan peternakan organik.
- e. Fasilitas prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan.
- f. Pengembangan usaha melalui fasilitas pembiayaan, asuransi, penguatan kelembagaan, kemitraan dan pendampingan usaha.
- g. Promosi produk dan usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- h. Pengembangan kerjasama pemasaran dalam dan luar negeri..
- i. Peningkatan akses pasar ekspor melalui *market intelligent*, harmonisasi protocol, dan fasilitas kemudahan ekspor.

Arah Kebijakan 2. Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional, dengan strategi (salah satu strategi yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan):

a. Penjaminan mutu produk peternakan.

Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) selain dapat dicapai dengan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar, dapat dicapai melalui daya saing mutu, yaitu dengan upaya peningkatan jaminan mutu hasil peternakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan penerapan dan pengawasan mutu hasil peternakan
- b. Fasilitas penjaminan mutu dan sertifikasi hasil peternakan

3.3 Kontribusi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terhadap Program Ditjen PKH, Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) Terhadap RPJMN

Kontribusi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terhadap program Ditjen PKH, Program Prioritas (PP) dan adalah pada **Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**. Secara keprograman dengan **kegiatan 5891 Hilirisasi Hasil Peternakan** dan klasifikasi rincian output sebagai berikut:

- AEA Koordinasi
- AFA Norma Standard Prosedur dan K
- PEH Promosi Produk dan Usaha Peternakan
- QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
- QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri merupakan salah satu dari program Direktorat Jenderal PKH yang mempunyai 3 program. Dua diantaranya adalah Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen.

Selanjutnya kontribusi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terhadap Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) terhadap RPJMN tercermin dari adanya indikator-indikator kinerja sebagai berikut yaitu:

- a. Kementerian Pertanian mendukung ASTA CITA Presiden Republik Indonesia yang ke 2 dan Program Nasional ke 2 dari RPJMN (PN2), yaitu **memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.**
- b. Kementerian Pertanian mengimplementasikan PN2 dimaksud dengan sasaran strategis (SS), dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung dengan sasaran program (SP). Selanjutnya Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mengoperasionalkan dalam sasaran kinerja dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2026

Sasaran Strategis Kementan	Sasaran Program Ditjen PKH	Sasaran Kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan	Indikator Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
SS1. Meningkatnya pendapatan petani	SP1. Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan (%)
SS2. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	SP2.4 Terjaminnya mutu komoditas peternakan	Terwujudnya produk peternakan bermutu	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar
SS3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	SP3.5. Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan (%)
SS4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	SP4.6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing

	peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi		terhadap total komoditas peternakan unggulan (%)
		Meningkatnya investasi bidang peternakan dan Kesehatan hewan	Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk penyederhanaan atau penambahan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Selama kurun waktu 2020-2024 fokus pemerintah lebih banyak kepada berbagai langkah untuk penyederhanaan ataupun menghilangkan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi dan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan. Pada periode 2025-2029 hal ini tetap akan dilakukan, utamanya dalam upaya peningkatan investasi untuk akselerasi produksi melalui penambahan populasi, dengan insentif investasi baik bagi pelaku usaha besar maupun UMKM.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan selama kurun waktu 2020-2024 telah melakukan penyusunan, revisi dan reviu regulasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang–Bidang Usaha Tertentu Pada Subsektor Peternakan.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
- e. Usulan revisi Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang–Bidang Usaha Tertentu Pada Subsektor Peternakan telah disampaikan kepada Menko Perekonomian.
- f. Usulan revisi Skema Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Alsintan telah disampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan definisi kerangka regulasi diatas maka perencanaan regulasi dapat mempengaruhi implementasi arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini kerangka regulasi yang diperlukan untuk Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan pada periode 2025-2029 sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Kerangka Regulasi	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian
	a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.		
	b. Permentan No. 18/2009 tentang Izin Usaha Obat Hewan		
	c. Perubahan substansi perijinan dan skala usaha yang ada pembaharuan; penambahan substansi pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, dan pengembangan usaha peternakan. Merupakan pengganti dari Permentan No. 14/2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	Penambahan substansi	
2	Revisi Permentan No 13/Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian
3	Pedoman Pengawasan Investasi Peternakan		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian
4	Petunjuk Teknis Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan		Keputusan Dirjen
5	Pedoman Teknologi Pengolahan Susu Pasteurisasi.	Sebagai acuan pelaku usaha dalam penerapan teknologi pasteurisasi susu, mulai penanganan bahan baku susu segar, peralatan dan teknologi proses pasteurisasi untuk skala mikro, kecil, dan menengah. Panduan ini memuat prinsip kerja pasteurisasi, pengaturan suhu dan waktu pemanasan, serta teknik pendinginan yang tepat untuk menjaga mutu dan keamanan susu	
6	Panduan Teknologi Pengolahan Telur Cair dan Tepung Telur	Sebagai acuan pelaku usaha mengenai persyaratan bahan baku, peralatan, dan teknologi proses pengolahan telur menjadi telur cair maupun tepung telur. Panduan ini juga memuat ketentuan mutu, keamanan pangan, higiene-sanitasi, serta penerapan GMP untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, dan memenuhi standar yang berlaku	Keputusan Dirjen
7	Panduan Teknologi Pengolahan Daging Ayam	Sebagai acuan pelaku usaha dalam penanganan daging ayam setelah penyembelihan, serta penerapan teknologi pengolahan seperti pengolahan naget ayam, sosis ayam dan bakso ayam. Panduan ini juga menjelaskan persyaratan mutu,	Keputusan Dirjen

		keamanan pangan, higiene–sanitasi, serta penerapan GMP agar produk olahan daging ayam aman, bermutu, dan layak diedarkan.	
8	Panduan Teknologi Pengolahan Daging Sapi	Sebagai acuan pelaku usaha dalam penanganan pascapanen yang baik, serta penerapan teknologi pengolahan seperti pengolahan bakso, sosis dan kornet. Panduan ini juga mencakup persyaratan mutu, keamanan pangan, serta penerapan higiene, sanitasi, dan GMP untuk menghasilkan produk olahan daging sapi yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan.	Keputusan Dirjen
9	Panduan Teknologi Pengolahan Sarang Burung Walet	Sebagai acuan pelaku usaha dalam penanganan SBW kotor melalui proses pencucian menjadi SBW bersih serta teknologi pengolahan SBW. Panduan ini juga memuat prinsip higiene–sanitasi dalam penanganan dan pengolahan SBW sehingga menghasilkan produk yang aman dan memenuhi standar mutu.	Keputusan Dirjen
10	Panduan Teknologi Pengolahan Madu	Sebagai acuan pelaku usaha tentang penanganan madu mulai dari panen hingga siap dikemas dengan tetap menjaga mutu dan keamanan produk. Panduan ini juga mencakup teknik pengurangan kadar air, stabilisasi, pengisian kemasan yang higienis, serta penyimpanan.	Keputusan Dirjen
11	Panduan Teknologi Pengolahan Pupuk Organik Padat dan Cair	Sebagai acuan pelaku usaha dalam mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik yang aman dan bernilai guna. Meliputi penanganan bahan baku, teknologi pengolahan dan standar mutu produk.	Keputusan Dirjen
12	Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan		Keputusan Dirjen PKH
13	Panduan Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Produk Peternakan	Mekanisme fasilitasi promosi yang terstandar, pameran, misi dagang, business matching dan pendampingan pelaku usaha ekspor, koordinasi lintas unit	Keputusan Dirjen PKH
14	Pedoman Sistem Informasi Pemasaran	Kebijakan berbasis data mencakup informasi data harga, kinerja ekspor, dan distribusi sapi melalui kapal ternak	Keputusan Dirjen PKH
15	Panduan Distribusi/Transportasi Peternakan yang Baik	Tatacara Hasil Penerapan prinsip dan standar yang mengatur tata kelola transportasi produk agar kualitas, keamanan tetap terjaga sepanjang rantai distribusi	Keputusan Dirjen PKH

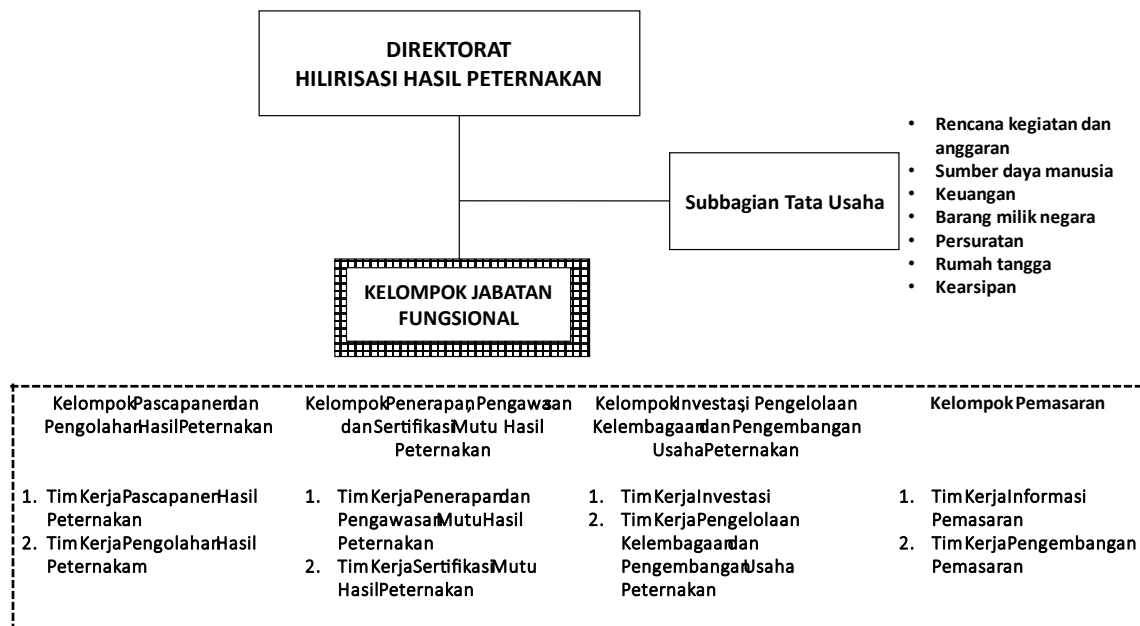
Regulasi akan disederhanakan maupun untuk diperkaya dengan penambahan substansi pengembangan usaha, investasi, pascapanen, standar mutu, pengawasan dan sertifikasi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan selama kurun waktu 2025-2094. Regulasi yang akan dibuat diharapkan lebih sederhana

sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha dan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha peternakan dan kesehatan hewan lebih cepat lagi.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Organisasi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan memerlukan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan dengan perubahan yang ditetapkan pemerintah dengan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.



Gambar 4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024, Kementerian Pertanian memiliki 10 eselon I, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berganti nomenklatur menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyusun 5 (lima) sasaran kegiatan yaitu: tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan, meningkatkannya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor, meningkatkannya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing, meningkatkannya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu

Kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa rincian output dan aktivitas yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja. Target kinerja ini sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi kegiatan dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mempunyai 1 (satu) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Ada 6 (enam) indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Setiap capaian indikator berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Target kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan ini merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja sasaran program Ditjen PKH.

Tabel 9. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKH Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima Peternak	IKP 1.1	Indeks harga yang diterima Peternak (indeks)	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41
SP 2	Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan	IKP 2.1	Produksi Daging (Juta ton)	4,97	5,12	5,28	5,44	5,60
		IKP 2.2	Produksi Telur (Juta ton)	6,81	7,04	7,31	7,62	7,97
		IKP 2.3	Produksi Susu (ribu ton)	856,04	1.036,79	1.209,70	1.420,07	1.665,35
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan	IKP 3.1	Indeks Mutu komoditas peternakan (indeks)	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	IKP 4.1	Indeks keamanan komoditas peternakan (indeks)	0,61	0,63	0,66	0,68	0,69
SP 5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	IKP 5.1	Volume ekspor komoditas peternakan (ton)	499.432	514.415	540.136	567.143	595.500
SP 6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas	IKP 6.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (indeks)	0,2	0,4	0,6	0,8	1

	peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi							
SP 7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	IKP 7.1	Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkontrol dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan	80	80,3	80,6	80,95	81,2
SP 8	Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	IKP 8.1	Persentase wilayah yang terkontrol dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	41	41,5	42	42,5	43
SP 9	Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen PKH yang baik, transparan, dan akuntabel	IKP 9.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	88,501	88,756	89,161	89,566	89,961

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan (%)	100	100	100	100	100
SK 2	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	IKK 2.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar (%)	100	100	100	100	100
		IKK 2.1	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian (%)	98	98	98	98	98
SK 3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	IKK 3.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan (%)	45	50	55	60	65
SK 4	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	IKK 4.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan (%)	20	40	60	80	100
SK 5	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	IKK 5.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26

4.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan kebijakan dan strategi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan serta pencapaian target sasaran membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Sumber dana pengembangan hilirisasi hasil peternakan tidak bisa hanya mengandalkan dari Pemerintah, tapi dapat berasal dari seluruh *stakeholders* pembangunan hilirisasi hasil peternakan. Pendanaan dapat berasal dari pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD), swasta, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA), Lembaga Keuangan dan Perbankan (skim kredit dan kredit komersial), dan swadaya masyarakat.

Indikasi kebutuhan pendanaan dari APBN untuk Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sampai dengan tahun 2029 sebagaimana Tabel 11. Rencana Kerja Tahunan pelaksanaan kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebagaimana pada

3.

Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025- 2029

KRO	Rincian Output (RO)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan		4.500	25.000	80.377	81.524	84.471
AFA	AFA 001. NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	300	400	600	700	1.000
PEH	PEH 001. Promosi produk dan usaha peternakan	-	860	3.077	3.474	3.750
AEA	AEA 002. Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	2.277	1.970	4.800	4.800	5.280
QDB	QDB 001. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1.923	220	4.900	5.000	5.320
	QDB 002. Fasilitasi dan Pembinaan Investasi Peternakan	-	21.500	66.500	66.800	67.921
QIC	QIC 001. Pengawasan Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hasil Peternakan	-	50	500	750	1.200

BAB V

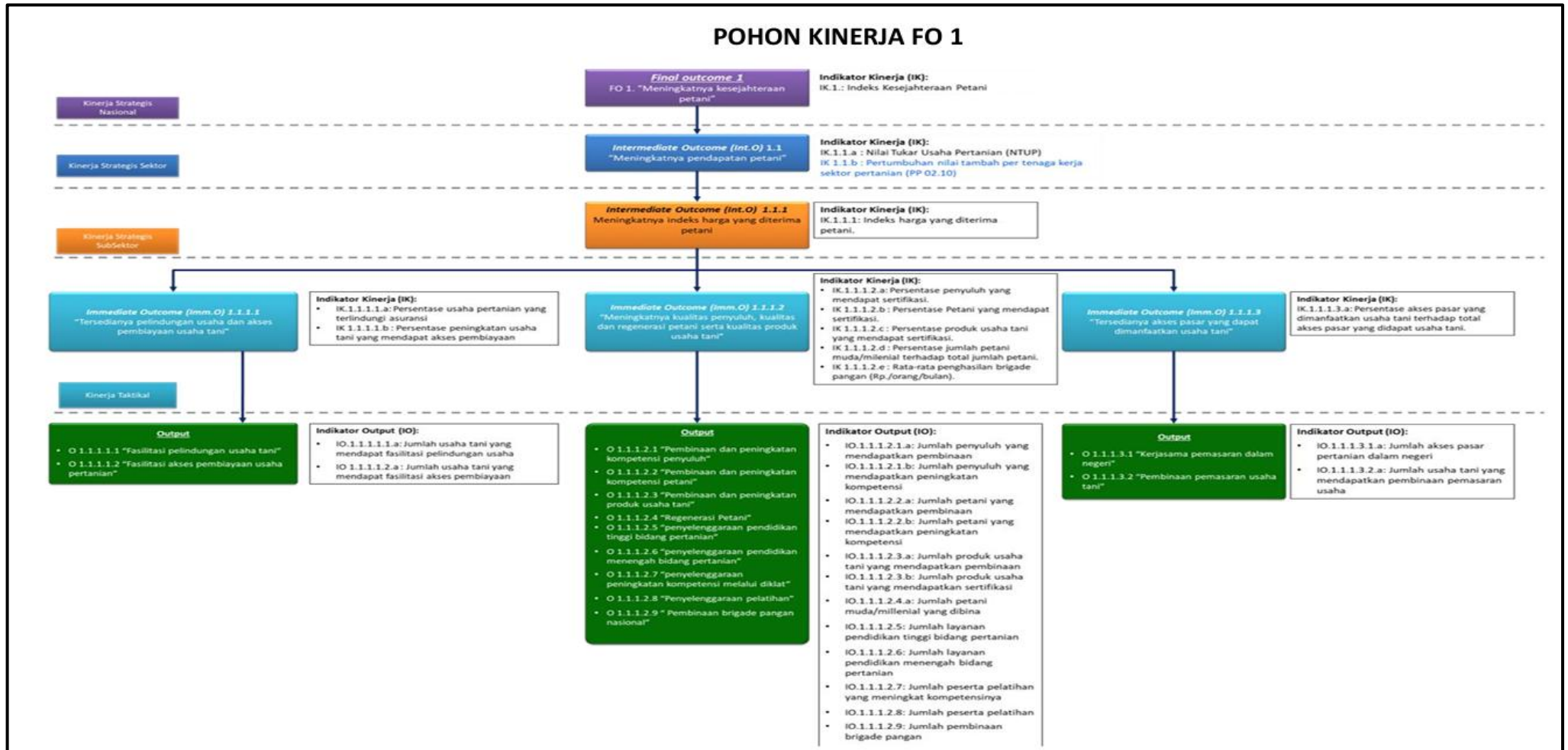
P E N U T U P

Rencana Strategis Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 subsektor peternakan. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

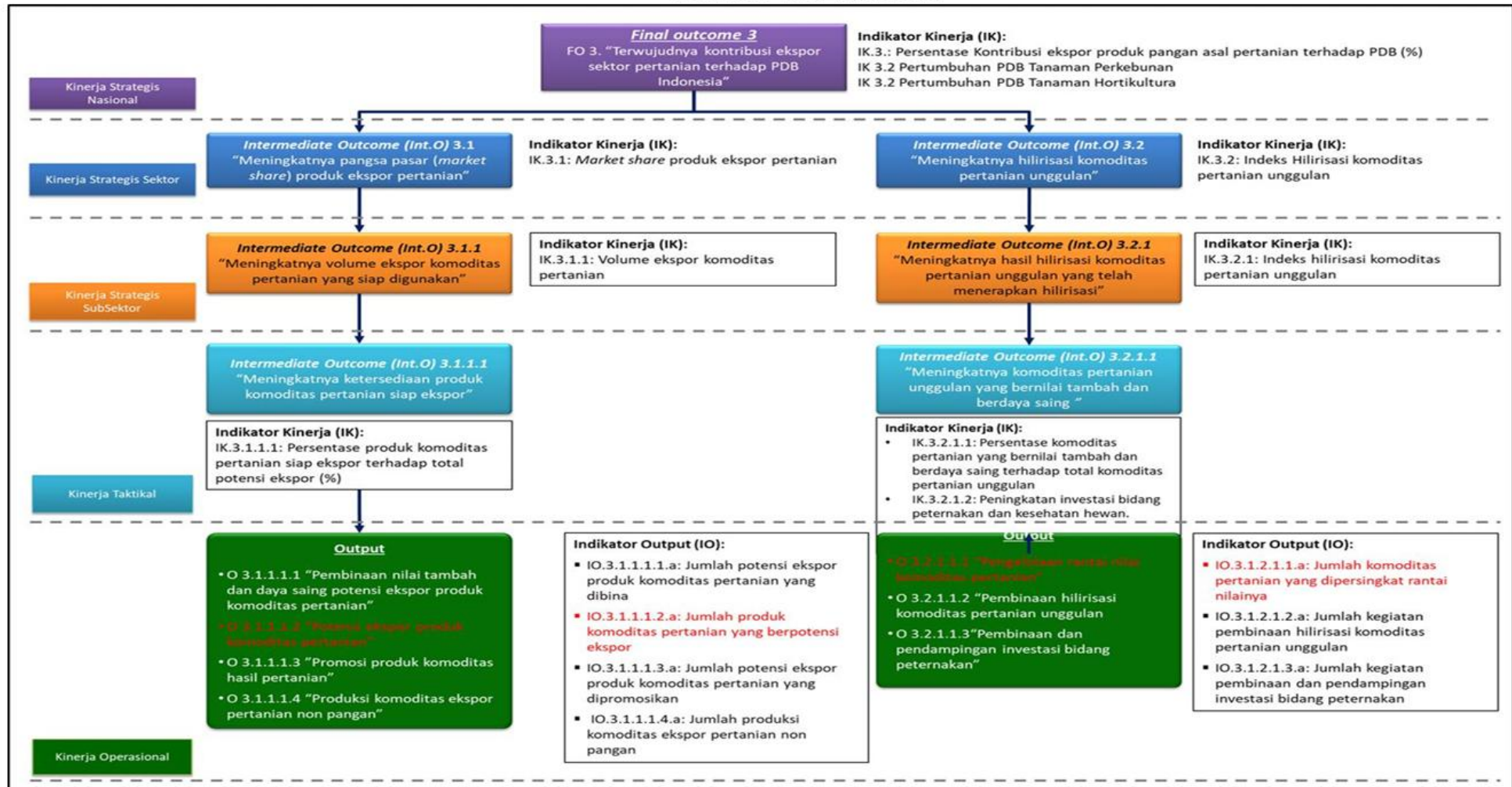
Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian khususnya, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum, termasuk peternakan. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagai bagian dari Kementerian Pertanian mengambil peran dalam mewujudkan visi tersebut.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini sesuai perkembangan visi, misi dan arah kebijakan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal PKH, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

POHON KINERJA



POHON KINERJA FO3



Lampiran 2

Matrik Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri									4.500	25.000	80.377	81.524	84.471
SP.15	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak								300	400	600	700	1.000
IKP 15.1	Indeks Harga yang diterima peternak	indeks	122,91	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41	300	400	600	700	1.000
SP.16	Terjaminnya mutu komoditas peternakan								1.923	270	5.400	5.750	6.520
IKP 16.1	Indeks Mutu komoditas peternakan	indeks	0	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	1.923	270	5.400	5.750	6.520
SP.17	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan								-	860	3.077	3.474	3.750
IKP 17.1	Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan	Ton	489.639	499.432	514.415	540.136	567.143	595.500	-	860	3.077	3.474	3.750
SP.18	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi								2.276,81	23.470	71.300	71.600	73.201
IKP 18.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	indeks	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	2.276,81	23.470	71.300	71.600	73.201

Lampiran 3

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Kegiatan (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
5891	Hilirisasi Hasil Peternakan								4.500	25.000	80.377	81.524	84.471
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan								300	400	600	700	1.000
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	%	100	100	100	100	100	100	300	400	600	700	1.000
KRO	AFA Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur								300	400	600	700	1.000
RO	AFA 001. NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	NSPK	RO baru	3	4	4	4	4	300	400	600	700	1.000
SK.2	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor								-	860	3.077	3.474	3.750
IKK 2.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	%	40	45	50	55	60	65	-	860	3.077	3.474	3.750
KRO	PEH Promosi								-	860	3.077	3.474	3.750
RO	PEH 001. Promosi produk dan usaha peternakan	Promosi	RO baru	-	5	6	7	8	-	860	3.077	3.474	3.750
SK.3	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing								2.277	1.970	4.800	4.800	5.280
IKK 3.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	%	-	20	40	60	80	100	2.277	1.970	4.800	4.800	5.280
KRO	Koordinasi								2.277	1.970	4.800	4.800	5.280
RO	AEA 001. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4	4	-	-	-	-					
RO	AEA 002. Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	Kegiatan	RO baru	-	10	12	14	16	2.277	1.970	4.800	4.800	5.280
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	-	-	-
RO	RAG 001. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	41	-	-	7	7	10					
KRO	RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	-	-	-
RO	RBK 001. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	38	-	-	7	7	10					
SK.4	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan								-	21.500	66.500	66.800	67.921
IKK 4.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	15,76	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26	-	21.500	66.500	66.800	67.921
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								-	21.500	66.500	66.800	67.921
RO	QDB 002. Fasilitasi dan Pembinaan Investasi Peternakan	Lembaga	RO baru	-	274	274	274	274	-	21.500	66.500	66.800	67.921
SK.5	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu								1.923	270	5.400	5.750	6.520
IKK 5.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	Indikator Baru	100	100	100	100	100	1.923	220	4.900	5.000	5.320
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			20	6	8	10	12	1.923	220	4.900	5.000	5.320
RO	QDB 001. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	43	20	6	8	10	12	1.923	220	4.900	5.000	5.320
IKK 5.2	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH	%	Indikator Baru	98	98	98	98	98	-	50	500	750	1.200
KRO	QIC Pengawasan dan pengendalian lembaga								-	50	500	750	1.200
RO	QIC 001. Pengawasan Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hasil Peternakan	Lembaga	RO baru	0	4	6	8	10	-	50	500	750	1.200

Lampiran 4

Manajemen Risiko Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

No	Jenis Konteks (Sasaran Kegiatan)	Nama Konteks (Nama Sasaran Kegiatan)	Indikator	Proses Bisnis (Tahapan Kegiatan)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko (Aktivitas Pengendalian)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaran Kegiatan	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	Keterbatasan upaya koordinasi dengan pihak/stakeholder terkait dalam menjalin kerjasama guna membuka akses pasar baru	Kurangnya sosialisasi terkait dengan regulasi dan peraturan yang berlaku	Melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan regulasi dan peraturan yang berlaku
2		Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Promosi dan pendampingan pelaku usaha ekspor Promosi Produk Hasil Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan upaya branding produk dari para pelaku usaha Pelaku usaha tidak memahami persyaratan-persyaratan produk dan administrasi untuk ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman digital branding terhadap suatu produk Kurangnya pemberian informasi terkait persyaratan- persyaratan negara tujuan ekspor dari pembina pusat 	Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait dengan digital branding dan sosialisasi prosedur serta syarat ekspor suatu produk ke negara-negara tujuan ekspor
3		Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan Koordinasi Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan Koordinasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan Koordinasi Hilirisasi Hasil Peternakan 	Keterbatasan pemahaman Unit Pengolahan Hasil & OPD terkait produk bernilai tambah dan berdaya saing	Kurangnya kompetensi SDM pembina pusat dalam melakukan pendampingan mutu dan pengolahan terhadap Unit Pengolahan Hasil dan OPD	Memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM pada UPH maupun OPD
4		Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Investasi Pendampingan/Koordinasi/Pembinaan Investasi 	Pelaku usaha belum memahami proses dan persyaratan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha dalam proses dan persyaratan perizinan. Rendahnya investasi peternakan terintegrasi dan peternakan sapi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada pelaku usaha terkait dengan prosedur dan syarat perizinan Regulasi dan deregulasi kemudahan dan insentif investasi Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait dan calon investor. Penyediaan informasi dan pendampingan pemanfaatan lahan kepada calon investor. Pendampingan perizinan berusaha dan kemitraan budidaya
5		Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan dan Penerapan Pengawasan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hewan Pendampingan Pascapanen dan Pengolahan 	Unit Pengolahan Hasil tidak memahami teknis persyaratan mutu dalam mengolah hasil peternakan, pengelolaan kelembagaannya dan cara memasarkan produk yang dihasilkan	Kurangnya pembinaan kepada Unit Pengolahan Hasil terkait teknis persyaratan mutu dalam mengolah hasil peternakan, pengelolaan kelembagaannya dan cara memasarkan produk yang dihasilkan oleh pembina pusat atau OPD.	Melakukan bimbingan dan pendampingan pada UPH terkait teknis persyaratan mutu dalam mengolah hasil peternakan, pengelolaan kelembagaannya dan cara memasarkan produk yang baik
6			Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian	Pengawasan penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan	Pelaku usaha belum memahami syarat uji mutu sebelum suatu produk beredar	Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha terkait dengan syarat uji mutu	Memberikan pendampingan dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai syarat uji mutu yang diperlukan

Lampiran 5

**Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
Tahun 2025-2029**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja/Uraian
SK 1.	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan
IKSK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tingkat pemanfaatan peluang atau akses pasar oleh pelaku usaha peternakan (unggas) dari total akses atau peluang pasar yang tersedia dan telah berhasil dibuka. Total akses pasar yang didapat adalah jumlah kemitraan usaha peternak unggas (plasma) dengan perusahaan inti pada tahun berjalan. Akses pasar yang dimanfaatkan adalah termanfaatkannya peluang kemitraan yang digunakan secara aktif oleh inti plasma.</p>
	<p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kemitraan unggas Ditjen PKH 2. Laporan pelaku usaha
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Berdasarkan trend realisasi kemitraan unggas yang dilaporkan pelaku usaha</p>
	<p>Baseline 2024: 90%</p> <p>Cara menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi data kemitraan unggas Ditjen PKH. 2. Identifikasi laporan kejadian kasus akses pasar kemitraan 3. Hitung dengan rumus: $\frac{\text{Total Kemitraan} - \text{Jumlah Laporan Kasus Akses Pasar Kemitraan}}{\text{Total Kemitraan}} \times 100\%$

	Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU:Tahunan
SK 2.	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor
IKSK 2.1.	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Indikator ini mengukur sejauh mana kesiapan produk peternakan nasional untuk memasuki pasar ekspor dibandingkan dengan total potensi ekspor yang tersedia. "Produk siap ekspor" merujuk pada komoditas peternakan yang telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, persyaratan teknis serta ketentuan negara tujuan ekspor, sedangkan "total potensi ekspor" mencakup keseluruhan volume atau jenis produk peternakan yang berpotensi diekspor berdasarkan produksi dalam negeri dan kapasitas industri dikurangi dengan konsumsi/kebutuhan dalam negeri.</p> <p>Produk komoditas peternakan siap ekspor yang diukur adalah produk unggas dan sarang burung walet</p>
	<p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data proyeksi produksi Ditjen PKH, data proyeksi konsumsi dalam negeri. 2. BPS 3. Statistik Ditjen PKH
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total produksi unggas dan sarang burung walet tahun dasar (baseline). 2. Identifikasi total konsumsi unggas dan sarang burung walet dalam negeri tahun dasar (baseline) 3. Hitung dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah produksi} - \text{jumlah konsumsi}}{\text{Jumlah produksi}} \times 100\%$
	Baseline 2024: 40%
	<p>Cara Menghitung:</p> $\frac{\text{Jumlah produksi} - \text{jumlah konsumsi}}{\text{Jumlah produksi}} \times 100\%$

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi adalah total produksi unggas dan jumlah produksi SBW pada tahun berjalan 2. Jumlah produksi SBW berdasarkan asumsi rata-rata volume ekspor (ton) 3. Jumlah konsumsi unggas dalam negeri berdasarkan konsumsi perkapita/tahun atau kebutuhan dalam negeri/tahun 4. Jumlah konsumsi SBW dalam negeri berdasarkan asumsi maksimal 5% dari total produksi/ekspor SBW <p>Satuan Pengukuran: persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
SK 3	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing
IKSK 3.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah terhadap total komoditas peternakan unggulan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Rasio dalam persentase dari jumlah komoditas peternakan yang bernilai tambah dibagi total komoditas peternakan unggulan.</p>
	<p>Sumber data:</p> <p>BPS, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan</p>
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan. 2. Total komoditas peternakan unggulan adalah susu, daging, telur, sarang burung walet dan madu.
	<p>Baseline 2024:</p> <p>Baseline 2024 adalah 0 yang artinya Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan merupakan IKSK baru.</p>
	<p>Cara Menghitung:</p>

	$\frac{\text{Jumlah komoditas yang bernilai tambah dan berdaya saing}}{\text{Jumlah komoditas peternakan unggulan}} \times 100\%$ <p>1. Jumlah komoditas yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas unggulan prioritas yang mendapat pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah melalui pascapanen dan/atau pengolahan</p> <p>2. Total komoditas peternakan unggulan adalah 5 komoditas, yaitu daging ayam, daging sapi, susu, telur dan sarang burung walet.</p>
SK 4	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
IKSK 4.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Peningkatan investasi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan rataan peningkatan nilai investasi baru maupun perluasan yang berasal dari PMA dan PMDN dibidang peternakan dan kesehatan hewan.</p>
	<p>Sumber data:</p> <p>Laporan BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi</p>
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Nilai rataan persentase peningkatan investasi PMA dan PMDN dibidang peternakan dan kesehatan hewan ditahun berjalan</p>
	Baseline 2024: 15,76 %
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>Peningkatan Investasi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan (%) = $\frac{\text{Persentase Pertumbuhan PMA tahun berjalan} + \text{Persentase Pertumbuhan PMDN tahun berjalan}}{2}$</p> <p>a. Persentase Pertumbuhan PMA tahun berjalan (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah PMA tahun berjalan} - \text{jumlah PMA tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah PMA tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$</p> <p>b. Persentase Pertumbuhan PMDN tahun berjalan (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah PMDN tahun berjalan} - \text{jumlah PMDN tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah PMDN tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$</p>

	<p>Satuan Pengukuran : Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi : Maximize Periode Data IKU : Tahunan</p>
SK 5.	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu
IKSK 1.	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar
	<p>Deskripsi:</p> <p>Peningkatan komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan standar mutu (SNI/PTM/NSPK/lainnya) untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan siap edar.</p>
	<p>Sumber data:</p> <p>Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan</p>
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Penetapan target produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu berdasarkan pada hasil pengawasan/pengujian produk peternakan yang dihasilkan oleh unit usaha/UPH yang siap edar. Pengambilan sampel dilaksanakan secara purposif /random sampling.</p>
	Baseline 2024: belum ada karena merupakan indikator baru
	<p>Cara Menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu. 2. Identifikasi jumlah pengawasan/pengujian mutu hasil peternakan secara sampling 3. Hitung dengan rumus: $\text{Persentase} = \frac{\text{Total komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu}}{\text{Total jumlah pengawasan/pengujian mutu hasil peternakan}} \times 100 \%$ <p>Satuan Pengukuran: % Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>